



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SRI RUM GIYARSIH
2. Jabatan : KETUA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI KEPENDUDUKAN
3. NHK : 961691

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.050.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 492 m2/150 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 959 m2/425 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
3. Tanah Seluas 1.299 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **497.800.000**

1. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI MINIBUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.900.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.900.000
5. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **282.585.291**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp.

Rp.

3.830.385.291

III. HUTANG

Rp.

620.959.468

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

3.209.425.823

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.